

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R (2014). *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Astutiawaty, L., Lukita, C., & Astriani, D. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Mahasiswa Manajemen dan Akuntansi*, 2(2), 242-262.
- Badan Statistik keuangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. DJPK Kemenkeu (Diakses 26 Mei 2023) <https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd>
- Elni (2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota Di Sulawesi Tengah. *Jurnal Katalogis*, Vol 4 Nomor (2), 111.
- Erlina, & Mulyani, S. (2008). *Metodologi Penelitian Bisnis: Untuk Akuntansi dan Manajemen* (1ed.). Medan: USU Press.
- Ferdiansyah, Irfan, dkk. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Primbangan terhadap Belanja Daerah. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Vol. 14, No. 1, Hal 44-52.
- Ferdian (2013). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Terhadap Belanja Daerah Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat.
- Ghozali, I. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 21*, Edisi 7. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. 2020. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*, Edisi 10. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23*, Edisi 7. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdul, 2007. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*, Edisi Revisi, Jakarta, Penerbit Salemba Empat.
- Halim 2014. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*, Edisi Revisi, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 6757 (2022). Diambil dari <https://djpk.kemenkeu.go.id/?p=22499>
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, DPR (2004). Diambil dari <http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/33.pdf>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (2014). Indonesia Diambil dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (2004). Indonesia. Diambil dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40770/uu-no-33-tahun-2004>
- Kuncoro, M. (2004). *Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi Perencanaan Strategi dan Peluang*. (W. C. Kristiaji, Ed.). Jakarta: Erlangga
- Mardiasmo. 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Andi. Yogyakarta.
- Masayu Rahma W, & Catur Martian, F. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Kota Bandung. *Jurnal Kajian Akuntansi*, Vol 1 Nomor (1), 63-76
- Muttaqin, E.E. Sari, W., Ritonga, P., & Fadillah, D. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Pemerintahan Daerah Kabupaten. *Economics, Business and Management Science Journal*. Vol (1) Nomor (1), 22-28
- Ni Made Arni A, & Ketut Alit S. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Pada Belanja Daerah. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Vol 25 Nomor (2), 877-904
- Wikipedia (Diakses 26 Mei 2023) Daftar kabupaten dan Kota di Indonesia - Wikipedia Bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
- Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (2019). Diambil dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/103888/pp-no-12-tahun-2019>

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (2011). Indonesia. Diambil dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/167662/permendagri-no-21-tahun-2011>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (2020). Indonsia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan, 09 Desember (2005). Indonesia. Diambil dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/49730/pp-no-58-tahun-2005>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1985 Tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah, dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (1975). Indonesia. Diambil dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/perpres-no-185-tahun-2014>
- Fatmasari (2014). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Anggaran Belanja Modal Pada Seluruh Kabupaten Kota di Provinsi Kepulauan Riau. *Jurnal Umrah*.
- Susilowati, D., Sitinjak, C. A. D., & Juwari, J. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Terhadap Belanja Daerah Kota Balikpapan. *Jurnal GeoEkonomi*, 12(1), 115-126.
- Sulistiyowati (2011). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Alokasi Belanja Modal. Skripsi, Universitas Diponegoro.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tambunan, T. T. H. (2015). *Perekonomian Indonesia Era Orde Lama Hingga Jokowi*.